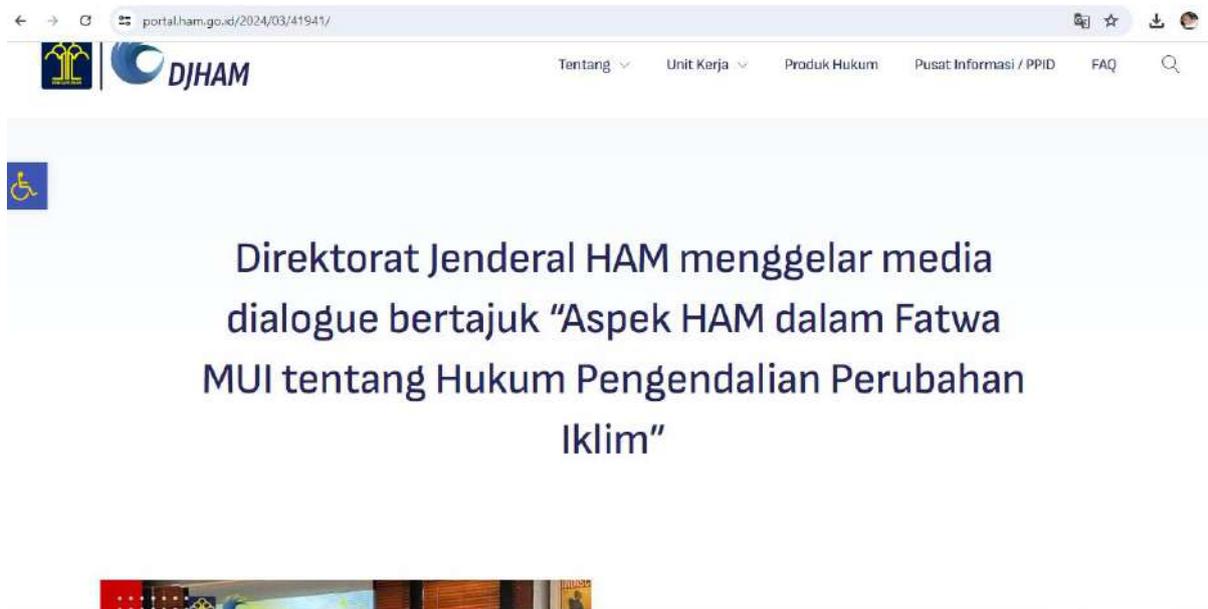


KLIPING BERITA HUKUM MARET 2024



...na Kas
...turkan, j
...l terhad
...hama t
...ak kas
...pa! Tam
...ga sek
...an my
...nyele
...ang
...leng
...men
...ma
...kin b
...si si
...ke
...pe
...m
...ku
...no c
...di ma
...rasan
...ana Sib
...skrim Big
...minan, ad
...mendap
...Se
...ah situ
...putro, t
...rtuput V
...angan m
...ngi, Ken
...laktan d
...dan ka
...dukun",
...jelasny
...pengaha
...huk
...behsng
...Penye
...sual an
...men
...ak. Per
...blakti
...anatan
...konpo
...nal jita
...an, Se
...an ba
...jelas
...pateras
...ber
...seksu
...ap
...golan
...hukum
...men
...nyang
...men
...Namun,
...se
...dikomb
...habsas
...dan li
.../e10/aug

Sumber: Portal HAM
Tanggal: 22 Maret 2024



Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar media dialogue bertajuk “Aspek HAM dalam Fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim” di Hotel Orient Jakarta Pusat, Jumat, (22/3/2024). Agenda ini menghadirkan Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, dan Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Dhahana menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memitigasi perubahan iklim. Salah satunya dengan Indonesia menjadi negara pihak dalam Paris Agreement dengan disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2016.

Guna menguatkan komitmen tersebut, KemenkumHAM menginisiasi strategi nasional bisnis dan HAM. Inisiasi tersebut kemudian disahkan Presiden Joko Widodo dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

“Dalam pilar kedua strategi bisnis dan HAM, kita mendorong perusahaan memiliki tanggung jawab mengatasi dampak negatif dari operasional bisnis termasuk perusahaan lingkungan,” terang Dhahana.

Karena itu, Direktur Jenderal HAM mengapresiasi fatwa yang diterbitkan MUI terkait pengendalian lingkungan. Menurutnya, fatwa tersebut sejalan dengan semangat dalam bisnis dan HAM. "Kami menyambut baik fatwa MUI terkait hukum pengendalian perubahan iklim, ini tentu akan berdampak positif bagi kesadaran masyarakat terkait pentingnya memitigasi perubahan iklim," terang Dhahana.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Hayu Prabowo yang turut hadir menjadi narasumber menyatakan bahwa kegagalan pencegahan terhadap perubahan iklim berimplikasi terhadap HAM.

"Integrasi HAM dalam aksi iklim akan mendorong perbaikan strategi mitigasi dan adaptasi menjadi lebih efektif dan inklusif," terang Prabowo.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 10 November 2023 telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Fatwa tersebut mengatur bahwa segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim hukumnya haram.

Sumber: KontraS
Tanggal: 23 Maret 2024

← → 🔍 kontras.org/2024/03/23/penyelidikan-pro-justitia-pelanggaran-ham-berat-berjalan-segera-tuntaskan-kasus-pembunuhan-munir-secara-transparan-dan-bertanggung-jawab... ☆ 🌐

Penyelidikan Pro Justitia Pelanggaran HAM Berat Berjalan: Segera Tuntaskan Kasus Pembunuhan Munir Secara Transparan dan Bertanggung Jawab!

🕒 Maret 23, 2024



Pada tanggal 11 Maret 2024 Pemerintah Indonesia menjalani sidang Tinjauan Penerapan Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR) oleh Badan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dipimpin oleh Komite ICCPR di Palais Wilson, Jenewa pada tanggal 11-12 Maret 2024. Melalui sidang ini, Indonesia diminta untuk menjawab dan mengklarifikasi pertanyaan dari berbagai negara pihak ICCPR terkait dengan implementasi konvensi di Indonesia. Dalam sidang tersebut, Carlos Gómez Martínez perwakilan negara Spanyol menanyakan transparansi dan akuntabilitas laporan TPF Kasus Pembunuhan Munir. Delegasi Indonesia justru tidak merespon secara komprehensif dengan sekadar menjawab akan dikoordinasikan dengan komnas HAM dan Jaksa Agung. Dengan respon demikian, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia punya indikasi tidak serius dalam menuntaskan dan mengelaborasi perkembangan penyelesaian kasus munir dan terkesan abai terhadap komitmen dalam menjamin dan melindungi kerja-kerja pembela HAM.

Menginjak tahun 2024, kasus Pembunuhan Munir memasuki tahun ke 20. Sepanjang waktu tersebut, negara masih nampak belum mampu menghukum aktor intelektual dibalik pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib menggunakan mekanisme peradilan yang adil dan berkompeten. Dibunuhnya Munir bukanlah merupakan tindak pidana pembunuhan biasa, melainkan merupakan kejahatan kemanusiaan yang

dilakukan secara sistematis dengan melibatkan aktor serta institusi negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan BUMN Garuda Indonesia. Hal ini tentu memerlukan kombinasi kemauan politik negara dan juga prosedur hukum yang menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Terbaru perkembangan penanganan kasusnya tengah bergulir di Komnas HAM yang memproses melalui mekanisme Penyelidikan pro justitia Pelanggaran HAM Berat menggunakan prosedur Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Penyelidikan pro justitia oleh Komnas HAM ini menjadi sebuah peluang untuk dapat membongkar kejahatan sistematis dalam pembunuhan Munir Said Thalib yang kami harapkan dapat menyeret para aktor-aktor intelektual untuk bertanggung jawab secara hukum. Proses ini juga menjadi sebuah upaya dalam membongkar pemufakatan jahat yang mengakibatkan terjadinya pola sistematis dan terstruktur serta meluas yang menjadi salah satu komponen pelanggaran HAM yang berat (Gross Human Right Violation). Penyelesaian kasus Munir akan menjadi sebuah preseden baik bahwa Negara Indonesia sama sekali tidak mentolerir segala bentuk kekerasan kepada Pembela HAM dan memberikan jaminan perlindungan di masa depan terhadap kerja-kerja Pembela HAM dalam melakukan fungsi kontrol terhadap Negara dalam menjalankan kewajibannya terkait pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM (P5 HAM).

Ketidaksiannya Negara menyelesaikan kasus Munir dalam menyeret dalang pembunuhnya ke pengadilan merupakan sinyal bahaya bagi perlindungan pembela HAM di masa depan. Selain itu, minimnya langkah konkret dan serius terhadap kasus pembunuhan Munir akan semakin menjauhkan keluarga korban pada pencarian kebenaran dan keadilan.

Atas dasar tersebut Komite Aksi Solidaritas untuk Munir mendesak:

Pertama, Komnas HAM bekerja fokus dan maksimal dalam penyelidikan pro justitia terhadap kasus Munir. Penanganan yang lambat atau bahkan penundaan hanya akan menghasilkan ketidakpastian keadilan bagi keluarga korban untuk mendapatkan hak atas jaminan keadilan dan kebenaran. Kami juga mendorong Komnas HAM untuk

dapat menjamin kualitas penyelidikan dan memperhatikan dengan seksama aspek formil dan materiil dalam penyelidikan berbasis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

Kedua, Presiden Joko Widodo harus menjamin komitmen penuntasan kasus Munir sebelum masa jabatannya selesai. Hal ini merupakan bukti bahwa Presiden mampu dalam mendorong pertanggungjawaban penyelesaian HAM yang selama ini disorot oleh komunitas internasional di beberapa forum termasuk yang terbaru adalah forum tinjauan penerapan konvensi ICCPR di Jenewa pada 11-12 Maret 2024;

Ketiga, Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk segera membuka dokumen laporan TPF Munir kepada publik sebagaimana amanat yang tertuang dalam angka kesembilan Keppres 111/2004 tentang Pembentukan TPF Kasus Munir sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengungkapan kasus Munir.

Sumber: Kompas
Tanggal: 14 Maret 2024



JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mendorong pemerintahan berikutnya untuk melanjutkan penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Mahfud mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) masih berlaku dan patut untuk dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. "Keppres itu berlaku tidak terbatas waktu karena Keppres itu memerintahkan agar semua pelanggaran HAM berat itu korbannya disantuni semua dan itu saya kira bagus lah siapa pun pemerintahnya," kata Mahfud di Blok M Plaza, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Mahfud Sebut Pelanggaran HAM Kini Terjadi karena Keserakahan, Bukan Perang Ideologi Mahfud menuturkan, ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui pemerintah dan harus diselesaikan. Ia mengakui bahwa idealnya peristiwa pelanggaran HAM itu dibawa ke pengadilan HAM agar para pelakunya diadili. Namun, mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tersebut menyebutkan upaya tersebut tidak mudah untuk dilakukan karena kurangnya alat bukti. Ia mencontohkan, mereka yang terlibat dalam tragedi 1965-66 umumnya sudah berusia tua bahkan tidak sedikit yang telah meninggal dunia. "Pelakunya itu

sudah tidak ada. Kan pada saat itu tahun 65, pelaku-pelakunya yang sudah dewasa kan minimal sudah berusia 18 tahun. Nah pada tahun ini, mereka sebagian besar sudah meninggal," kata Mahfud. Ia menuturkan, undang-undang memang mengatur bahwa tidak ada masa kedaluarsa bagi pengusutan kasus pelanggaran HAM berat. Namun, lagi-lagi, membuktikan pelanggaran HAM berat di pengadilan bukanlah perkara mudah Mahfud Sebut Akan Kembali Menulis dan Mengajar Bila Tak Lagi jadi Bagian Pemerintah "Kami sudah membawa 34 terdakwa ke pengadilan. Itu ternyata oleh pengadilan dibebaskan semua 34. Tidak satu pun dihukum. Kenapa? Buktinya tidak ada, pelaku langsung tindak pidana tidak ada," kata dia. Oleh sebab itu, pemerintah kini menempuh penyelesaian jalur nonyudisial yang lebih menaruh perhatian pada kepentingan korban. "Yang saya lakukan sebagai pemerintah itu adalah korban. Pelakunya itu urusan sana, Kejaksaan Agung, DPR sana, urus itu pelaku siapa, mau dihukum berapa. Tapi yang kami datangi korban kayak gini tadi," kata Mahfud.

Sumber: KSP

Tanggal: 25 Maret 2024

← → ↻ ksp.go.id/ksp-peran-masyarakat-sipil-harus-diperkuat-di-festival-ham-2024.html ☆ 🌐

KSP : Peran Masyarakat Sipil Harus Diperkuat di Festival HAM 2024

📅 25/03/2024



Jakarta – Kantor Staf Presiden bersama Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pemerintah Kota Bitung, menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024. Penandatanganan dilakukan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Festival HAM merupakan acara tahunan untuk mempromosikan dan menyebarkan wawasan tentang penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Tahun ini, festival akan digelar di kota Bitung, Sulawesi Utara, pada 29 hingga 31 Juli 2024. Tema yang diusung adalah “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Tanggung Jawab Negara dari Daerah hingga Nasional”. Tema ini menekankan pentingnya peran negara dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan HAM di Indonesia.

Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad, mengatakan penyelenggaraan Festival HAM 2024 menjadi momentum refleksi 10 tahun perjalanan Festival HAM dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Ia pun

menekankan pentingnya kegiatan festival tidak hanya dalam bentuk seminar, melainkan berbagai kegiatan yang dekat dengan kehidupan nilai-nilai HAM sehari-hari.

“Agar Festival ini kembali kepada esensinya untuk tidak menjadi ajang yang berjarak dengan masyarakat tapi merasa dimiliki dan menjadi bagian dari mereka,” kata Rumadi usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024, di kantor Komnas HAM, Senin (25/3).

Rumadi juga menyampaikan Kantor Staf Presiden mendorong peran besar keterlibatan masyarakat sipil baik di tingkat nasional dan khususnya di tingkat daerah untuk menjadi pemain utama dalam perhelatan Festival HAM tahun ini. “Inisiasi, gerakan, keterlibatannya perlu kita akomodasi secara penuh melalui berbagai bentuk kegiatan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menjelaskan pelaksanaan Festival HAM 2024 di Bitung mejadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, serta upaya memperkuat perlindungan dan solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusi.

“Melalui beragam kegiatan yang dihadirkan dalam Festival HAM ini, kami berharap dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Mari bersama-sama kita jadikan Festival HAM ini sebagai wahana untuk menginspirasi perubahan positif menuju masyarakat yang lebih inklusif,” ujar Atnike.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INFID, Iwan Misthohizzaman, menilai Festival HAM 2024 momentum penting bagi penegakan HAM di Indonesia, terlebih kali ini berlangsung di tengah tahun demokrasi yang penuh ujian dan menyambut kepemimpinan nasional baru dengan banyak pekerjaan rumah di sektor pemajuan dan penyelesaian pelanggaran HAM. “Masyarakat sipil terus bergerak dalam bidang pemajuan HAM dan memainkan peran aktif untuk menuntut tanggungjawab negara dalam penegakan HAM dan demokrasi,” tegas Iwan Misthohizzaman.

Sebagai informasi, penetapan kota Bitung sebagai tuan rumah kegiatan ini didasarkan atas konsistensi dan komitmen pemerintah kota Bitung dalam memajukan HAM beberapa tahun terakhir, dan tidak terbatas pada prestasi yang diraih sebagai kota pedulu HAM pada 2023.

“Dengan ditandatanganinya MOU hari ini, maka Kota Bitung resmi menjadi tuan rumah pelaksanaan festival HAM 2024 karena itu terima kasih atas kepercayaan ini dan mari bersama kita sukseskan Festival ini karena festival ini milik kita bersama,” terang Walikota Bitung, Maurits Mantiri.

Festival HAM 2024 akan diisi oleh berbagai macam bentuk kegiatan. Mulai dari konferensi berupa diskusi pleno, diskusi paralel dan deklarasi serta non-konferensi berupa pentas seni budaya, pameran hasil karya rakyat, hingga kunjungan ke tempat-tempat dengan praktik baik terkait HAM yang potensial.